

# Ke Arah Desain Pendidikan di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Perbatasan Kalimantan Timur (Indonesia) - Malaysia

Anis Masykhur

## **Abstract**

*This article discusses the educational condition in the borders of northern part of East Kalimantan, one of the strategic areas being the veranda of Indonesia. To improve the educational quality there, it is necessary to specifically take into account the condition of those living in such geography. In addition, their lifestyle must also be accommodated in an educational orientation to benefit them because they are mostly farmers and fishermen. To strengthen the religious content, a "boarding" model like pesantren must be considered. For affordable educational expenses, more effective cooperation patterns between the government and the community must be attained, formulated and implemented.*

**Keywords:** *education, border, pesantren*

Anis Masykhur adalah  
Dosen STAIN Samarinda.  
Jl KH Abul Hasan No 03  
Samarinda

\*\*\*\*\*

Naskah diterima 2 Maret  
2010. Revisi pertama, 10  
Maret 2010, revisi kedua  
15 Februari 2010 dan  
revisi terakhir 25 Maret  
2010.

## **Abstrak**

Tulisan ini membahas kondisi pendidikan di wilayah perbatasan bagian utara Kalimantan Timur, salah satu wilayah yang strategis untuk dijadikan beranda Indonesia. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah ini, perlu ada

perhatian khusus terhadap keadaan dan kondisi masyarakat yang hidup dalam lingkup geografis perbatasan. Di samping itu, karena sebagian besar penduduk adalah petani dan nelayan dan dalam pola hidup mereka pun harus pula diakomodasi dalam orientasi penyelenggaraan pendidikan agar bermanfaat bagi mereka. Untuk memperkuat muatan keagamaan, model "boarding" (asrama/pondok) ala pesantren kiranya baik untuk dipertimbangkan. Agar biaya pendidikan terjangkau, pola kerjasama yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat perlu dicari, dirumuskan dan dilaksanakan.

**Kata kunci:** pendidikan, wilayah perbatasan, pesantren

## I. PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan bagian utara Indonesia khususnya Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia merupakan posisi yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara. Namun posisi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, justru dipakai secara efektif sebagai jalur illegal "perdagangan manusia,"<sup>1</sup> seperti halnya wilayah Entikong, di Kalimantan Barat, wilayah sebelah utara berbatasan langsung dengan Distrik Sabah, Malaysia. Sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Malinau [Kalimantan Timur], sedang di sebelah Barat berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur.

Kabupaten Nunukan merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan pada tahun 1999. Sebagai wilayah perbatasan, Nunukan juga banyak menjadi perhatian. Kasus perseteruan batas wilayah Ambalat,<sup>2</sup> juga menyinggung batas wilayah, termasuk Nunukan.

---

<sup>1</sup>Disebut "perdagangan manusia" dalam tanda petik tidak dimaksudkan sebagai pengiriman tenaga kerja illegal. Jalur perbatasan ini sering disebut sebagai jalan tikus.

<sup>2</sup>Ambalat bukan nama wilayah, namun merupakan kepanjangan dari *ambang batas laut territorial*. Batas zona ekonomi eksklusif ini sejauh 200 mil dari garis pantai. Lihat UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Karena Ambalat berada di sebelah timur dari Nunukan. Bahkan Nunukan menjadi basis pasukan angkatan laut saat itu.<sup>3</sup>

Meskipun strategis dilihat dari letak geografis dan potensi SDA dan SDM, kawasan ini belum banyak dimanfaatkan secara optimal, dan wilayah ini juga selalu tergolong tertinggal, terisolir dan belum berkembang.

Tingkat pendidikan masyarakat perbatasan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Persebaran sarana dan prasarana yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang tersebar secara berjauhan, mengakibatkan pelayanan pendidikan juga tertinggal.

Di samping sarana pendidikan yang sangat terbatas, minat penduduk terhadap pendidikan pun masih relatif rendah. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk daerah perbatasan yang meninggalkan desa untuk bersekolah, namun tidak menamatkan sekolahnya. Bahkan seringkali sekolah-sekolah di wilayah perbatasan terpaksa "diliburkan" pada saat musim panen tiba, karena murid-muridnya meninggalkan sekolah untuk membantu orang tuanya.

Wilayah perbatasan juga rawan menjadi transit perdagangan gelap, termasuk perdagangan manusia terselubung.<sup>4</sup> Para pakar menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia sangat beragam. Beberapa diantaranya adalah kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, konflik sosial, peperangan, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesem-

---

<sup>3</sup>Hal itu ditunjukkan dengan berlabuhnya kapal perang di Nunukan dan Tarakan. Hasil observasi tanggal 7 Juli 2007

<sup>4</sup>Istilah perdagangan manusia atau 'trafficking person' merupakan salah satu persoalan yang sering terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur. 'Trafficking person' mengacu pada *Protokol to Prevent, Suppres and Punish Trafficking Persons, Especially Women and Children*, adalah penerimaan, maksud untuk memberlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain dari penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau suatu kedudukan yang sifatnya mudah atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang lain yang memiliki control terhadap orang lain.

patan kerja, lemahnya penerapan hukum, serta pengaruh gaya hidup yang hedonistik.

Persoalan lain yang muncul di permukaan adalah tidak siapnya sumber daya manusia lokal dalam mengelola sumber daya alam yang ada, hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi lembaga pendidikan yang tugasnya tidak hanya mencerdaskan intelektual peserta didik namun juga mencerdaskan secara emosional, spiritual dan membekali keahlian yang mumpuni agar mampu mengelola sumber daya alam yang ada.

## II. MENGENAL WILAYAH PERBATASAN

### A. Kehidupan Nelayan dan Petani

Masyarakat perbatasan Kalimantan Timur ini khususnya di Kecamatan Sebatik<sup>5</sup> sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Hasil tangkapan ikan kadang di jual di masyarakat lokal, tapi tidak jarang pula harus dijual ke Tawau<sup>6</sup>—sebuah kota perdagangan kecil Malaysia— karena harga jual disana lebih menguntungkan.

Di sisi lain, beras yang dihasilkan petani lokal tidak banyak. Sehingga harus didatangkan dari luar Sebatik, bahkan dari negara tetangga.<sup>7</sup> Tidak hanya itu, barang-barang lain pun termasuk bahan bakar gas yang masuk di Sebatik adalah produk Petronas (Malaysia) yang datang tentunya dengan “diselundupkan.”

---

<sup>5</sup>Kecamatan Sebatik berada di pulau Sebatik yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Negeri Jiran Malaysia. Bahkan pulau Sebatik ini terbagi ke dalam dua wilayah. Sebagian adalah termasuk bagian dari wilayah Malaysia.

<sup>6</sup>Kota Tawau bagi Malaysia adalah kota yang diproyeksikan untuk kota perdagangan. Tawau menjadi beranda Malaysia yang berhadapan secara langsung dengan Indonesia. Bagi masyarakat perbatasan, jarak tempuh ke Tawau lebih dekat di banding ke ibu kota propinsi. Jika menjual produk pertanian dan perikananannya, harga belinya lebih tinggi dibanding harga di Indonesia.

<sup>7</sup>Begitulah mereka lebih suka menyebutnya untuk sebutan negara Malaysia. Karena memang letaknya yang berdekatan. Wawancara dengan Supardi tanggal, 8 Juli 2007

Secara keseluruhan masyarakat Kabupaten Nunukan yang berprofesi sebagai petani dan nelayan ini mencapai 54,75%.<sup>8</sup> sementara kehidupan petani dan nelayan di masih diidentikkan dengan kemiskinan.

### B. Perdagangan

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan,<sup>9</sup> masyarakat setempat yang berkecimpung di Perdagangan adalah 18,01%. Kehidupan masyarakat Sebatik berbeda dengan masyarakat Indonesia lainnya. Dalam transaksi sehari-hari mereka menggunakan mata uang ringgit. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih dekat ke Tawau (Malaysia) dibandingkan ke Nunukan. Biaya untuk ke Ibu Kota Kabupaten Nunukan juga lebih tinggi dibanding ke Tawau-Malaysia. Ongkos ke Nunukan adalah Rp. 200.000,-, sedangkan ke Tawau hanya Rp. 25.000,- (atau RM 10,-).<sup>10</sup>

### C. Perikanan

Lain pertanian lain pula perikanan. Kehidupan masyarakat nelayan yang berada di pesisir pantai cukup memprihatinkan. Mereka hanya mengandalkan perlengkapan ala kadarnya. Dengan kata lain, pengelolaan sumber daya laut ini belum secara optimal.

Pasca tragedi Ambalat, yakni peristiwa perebutan ambang batas wilayah teritorial, yang di dalamnya diprediksikan mengandung minyak bumi yang melimpah, pemerintah kabupaten membuat kebijakan memfasilitasi para petani dan nelayan untuk mengelola rumah tangkap ikan di tengah laut, yang orang menyebutnya dengan istilah "*bagan*." Dengan kata lain, *bagan* itu adalah "*bagan politik*."<sup>11</sup>

<sup>8</sup>BPS. 2006. *Nunukan dalam Angka Tahun 2006*. Nunukan: BPS.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Hasil observasi tanggal 9 Juli 2007

<sup>11</sup>Yang dimaksud dengan "*bagan politik*" adalah bahwa pengadaan *bagan* ini dimaksudkan untuk menegaskan kepada masyarakat luar negeri

*Bagan* dibangun dari konstruksi pepohonan pantai—sejenis pohon galam—yang biasanya mempunyai ketinggian 15 s.d. 25 m. Batang-batang pohon tersebut ditancapkan hingga mencapai dasar laut. Sebelum itu, seorang nelayan telah merakit konstruksi lantai *bagan* di pantai. Rakitan tersebut kemudian diseret dengan kapal/*speed boat* ke tempat yang direncanakan untuk dibangun *bagan*.

Selanjutnya, batang-batang pohon yang telah ditancapkan tersebut di rakit sedemikian rupa di bagian permukaannya, lalu diikatkan dengan rakitan lantai *bagan* yang dibawa dari tepi pantai. Jarak ketinggian lantai *bagan* dengan permukaan laut berkisar antara 3 s.d. 5 m. Di tengah-tengah *bagan* dibangun sebuah pondokan kecil untuk tempat berteduh dari derasnya hujan dan atau kencangnya angin laut.

Dari hasil tangkapan binatang laut melalui *bagan* tersebut penghasilan rata-rata nelayan—jika cuaca mendukung—adalah Rp. 2.000.000,- per minggunya. Bahkan ada yang lebih tinggi, yakni Rp. 5.000.000,-.<sup>12</sup>

Namun keberuntungan memang tidak dimiliki setiap orang. Ada juga, karena konstruksi *bagan* tidak kokoh, *bagan* bisa roboh tersapu ombak. Ada juga yang setelah selesai dibangun terpaksa dijual kembali kepada nelayan kaya lagi tangguh.<sup>13</sup>

Selain itu, *bagan* tersebut adalah sarana “politik,” yang keberadaannya bukan murni keinginan masyarakat, melainkan kemauan penguasa setempat.

---

bahwa Indonesia telah lama mengelola hasil lautnya dengan bukti *bagan* tersebut. Sehingga batas teritorial jika mengikuti ZEE, bisa 200 mil dengan start-nya dari *bagan* tersebut. Wawancara dengan Suniman La Tasi, 9 Juli 2007.

<sup>12</sup> Observasi tanggal 7-8 Juli 2007

<sup>13</sup> Menurut sebagian masyarakat bahwa *hasil bagan itu tidak terlalu menjanjikan* dan tidak mendukung kegiatan perekonomian. Wawancara dengan Musmulyadi, salah satu pengurus Yayasan di perbatasan ketika berdiskusi masalah pengembangan perekonomian. Wawancara Musmulyadi, 10 Juli 2007

#### **D. Pendidikan**

Lembaga pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah di Kecamatan Sebatik ini sebenarnya sudah cukup memadai. Pembukaan unit sekolah baru dari jenjang pendidikan dasar dan menengah sudah agak memadai. Hanya saja, terkendala oleh problem jarak, sementara ketersediaan fasilitas dan sarana transportasi sangat terbatas. Apalagi ketika hendak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Masyarakat Sebatik harus mengeluarkan biaya ekstra, karena di sana belum ada perguruan tinggi. Akhir tahun 2007, berdiri STAI Ibnu Khaldun. Animo masyarakat juga cukup besar, dengan diterimanya mahasiswa lebih dari 200 orang tahun ini. Mereka yang ingin belajar di luar Sebatik, lebih suka pergi ke Palu, atau Universitas Borneo di Tarakan.

### **III. MERUMUSKAN BENTUK DAN POLA PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN**

Asal mula munculnya lembaga pendidikan adalah atas dasar anggapan dan kenyataan bahwa pada umumnya para orang tua tidak mampu mendidik anak mereka secara sempurna dan lengkap. Karena itu mereka memerlukan bantuan kepada pihak lain, dalam hal ini lembaga pendidikan, walaupun dengan itu cita-cita mereka tidak otomatis tercapai. Warga masyarakat dan para personalia sekolah masih perlu perjuangan keras untuk mencapai cita-cita itu, yang hingga saat ini belum pernah berhenti. Sebab sejalan dengan perkembangan zaman, makin banyak yang perlu dipelajari dan diperjuangkan di sekolah.

Tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan yang unggul dari segi pembelajaran, fasilitas, fisik, ketenagaan, dan sarana penunjang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara pendidikan. Idealnya masyarakat tidak hanya menuntut untuk serta merta mendapatkan layanan pendidikan yang baik, namun secara penuh juga harus membantu pengembangan lembaga pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan merupakan faktor penting dalam percepatan pengembangan pendidikan. Keterlibatan tersebut diakomodasi dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Beberapa hal di bawah ini hendaknya diperhatikan dalam mendesain atau menyelenggarakan pendidikan baru di wilayah perbatasan.

### **A. Meminimalisir Ancaman Kebudayaan**

Roda kehidupan perekonomian masyarakat perbatasan yang tergantung dengan negara sebelah cukup mengancam eksistensi masyarakat Sebatik sebagai bagian dari warga kebangsaan Indonesia. Bahwa kegiatan-kegiatan perekonomian yang dilakukan melalui jalur penyelundupan seolah dilegalkan. Apalagi Pemerintah kurang begitu mengindahkan persoalan riil ini.

Begitu pula dengan perputaran mata uang negara sebelah [ringgit]. Selama ini mata uang rupiah sulit dicari. Peredarannya baru ada pasca tragedi ambalat. Salah satu Bank Nasional yakni BRI baru saja membuka cabang pembantu di Kecamatan Sebatik. Hal ini cukup mempengaruhi perputaran uang di wilayah ini. Mata uang Rupiah mulai tampak terlihat di pasaran.

Dengan demikian peristiwa deportasi TKI dari Malaysia tahun 2004-2005 dan peristiwa Ambalat di pertengahan 2005 telah membawa berkah tersendiri bagi masyarakat perbatasan terutama masyarakat Sebatik. Perhatian Pemerintah makin meningkat terhadap perbaikan infrastruktur, seperti rumah sakit, kantor pelayanan keamanan masyarakat (polisi dan TNI), dan lain sebagainya. Hampir setiap departemen memberikan alokasi program dan kegiatannya untuk daerah perbatasan, dari pembangunan jalan protokol, hingga kepada perbaikan-perbaikan penambahan energi dan jaringan air PDAM. Sayangnya, bangunan tersebut hanya berada di ibu kota propinsi.

Terkait dengan produksi hasil pertanian daerah, sebagaimana disebut di atas, hasil-hasil tangkapan ikan dan hasil pertanian dijual ke Malaysia. Hal itu dilakukan karena harga jualnya lebih tinggi dibanding dijual ke sesama warga di Indonesia.<sup>14</sup> Begitu juga dengan hasil perkebunan coklat, kelapa sawit, atau hasil

---

<sup>14</sup>Memang sempat kami berpapasan di tengah laut dengan beberapa nelayan yang membawa hasil tangkapannya untuk dijual di Tawau,



perkebunan lainnya. Para petani yang membudidayakan tanaman tersebut dengan jumlah yang terbatas akan menjualnya ke pedagang Malaysia. Jaraknya lebih dekat dan biaya lebih murah. Sementara harganya di atas standar Indonesia.

Kehidupan nelayan dan petani memang demikian adanya. Semangat perjuangan mereka gigih, namun giliran pemasarannya mereka merasa kesulitan untuk ke kota. Alternatif mempertahankan kehidupan perekonomian adalah dengan menjual ke negara tetangga meskipun tanpa ijin ekspor. Secara hukum mereka bisa disebut melakukan penyelundupan. Polisi laut juga sudah sama-sama tahu. Baik polisi Indonesia maupun polisi Malaysia.

Jarak tempuh ke Nunukan mencapai 2 - 2,5 jam dengan menelan biaya 100 ribu (via laut) dan 200 ribu (via darat). Apalagi ke kota Tarakan, bisa mencapai 3 - 4 jam dengan biaya 150 ribu (via laut). Sedangkan ke Tawau, hanya 15 menit dengan biaya kira-kira 15 ribu (5 ringgit). Jelas masyarakat akan memilih jarak tempuh yang lebih dekat dan menguntungkan.

Selain itu, sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan mudahnya akses informasi yang diterima negara tetangga melalui siaran radio, televisi, dan interaksi langsung dengan penduduk di negara tetangga maka orientasi kehidupan sehari-hari penduduk di perbatasan lebih mengacu kepada Serawak-Malaysia dibanding kepada Indonesia. Misalnya dalam hal pekerjaan mereka lebih menginginkan mengisi lowongan tenaga kerja di sana, karena gajinya cukup menjanjikan. Kondisi ini tentunya sangat tidak baik terhadap rasa persatuan, kebangsaan dan berpotensi memunculkan semangat disintegrasi.

Terbatasnya fasilitas umum, tingkat investasi dan infrastruktur serta kesempatan kerja yang tersedia di wilayah perbatasan mendorong penduduk untuk menyebrang ke Malaysia untuk bekerja di sektor perkebunan. Namun karena di sektor ini

---

negeri sebelah. Begitulah mereka menyebut Tawau, Malaysia. Terlalu keren untuk menyebut luar negeri.

tidak dibutuhkan ketrampilan tinggi, maka berpotensi memunculkan praktek perdagangan manusia.

Keadaan demikian bisa menjadi ancaman lebih buruk. Akar budaya dan tradisi masyarakat Sebatik bisa tergerus oleh tradisi negara tetangga. Semangat kebangsaan Indonesia perlahan-lahan terkikis oleh tekanan ekonomi dan upaya mempertahankan hidup.

### **B. Peluang Menjaring Putra-Putri TKI, Mungkinkah?**

Berdasarkan data pihak konsulat, sampai saat ini masih ada sekitar 36.000 anak TKI yang berada di sekitar Tawau dan Kinabalu. Sebuah angka yang spektakuler, apalagi sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak, karena ada kendala surat keterangan kependudukan orang tuanya yang bermasalah, antara lain karena status orang tuanya adalah tenaga kerja ilegal.<sup>15</sup>

Kekhawatiran lain yang melanda orang tuanya, di antaranya adalah, jika anak mereka telah keluar dari wilayah Malaysia (misalkan untuk belajar di Pulau Sebatik), kemungkinan besar mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia lagi bersama-sama orang tuanya, karena perizinannya tidak mereka punyai.<sup>16</sup>

Sementara itu, sebuah yayasan pendidikan yang bernama Yayasan Islam Indonesia Pulau Sebatik (YIIPS) sedang berupaya mempersiapkan ke arah itu. Penempatan para santri yang berasal dari luar Pulau Sebatik atau yang jauh jangkauannya mulai dimukimkan di rumah penduduk.<sup>17</sup> Langkah yang perlu dilakukan dengan segera adalah koordinasi bersama-sama dengan masyarakat setempat.

<sup>15</sup>Hemat peneliti, ada kemungkinan keadaan seperti itu memang dikondisikan sedemikian rupa, sehingga generasi barunya akan tetap menjadi pekerja perkebunan. Sebab, jika generasi barunya lebih terdidik, maka kemungkinan para pemilik kebun akan kehilangan tenaga kerja murah. Lihat dalam [www.studi-perbatasan.blogspot.com](http://www.studi-perbatasan.blogspot.com)

<sup>16</sup>Wawancara dengan Musmulyadi, 10 Juli 2007

<sup>17</sup>Pada tahun 2007, data putra-putri TKI yang menempuh pendidikan di jenjang MTs dan MA di YIIPS ini hanya berkisar 5 s.d. 10 anak.

YIIPS saat ini sedang mempersiapkan bangunan asrama yang dibantu Kementerian Agama. Namun, kondisi lembaga pendidikan tersebut saat ini tidak memadai untuk melangkah ke arah itu. Keberadaan YIIPS sebagai tempat studi putra-putri TKI saat ini tampak masih setengah hati, karena para pengelolanya masih mengalami banyak kendala.

### **C. Penyelenggaraan Pendidikan Biaya Murah**

Pendidikan adalah salah satu wahana terpenting dan paling strategis dalam proses pembentukan *human resources* (SDM) yang mandiri dan berkualitas tinggi. Masalah pendidikan dan pengembangan SDM memang telah menjadi isu utama dalam pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan di era reformasi ini sangat tergantung pada kapasitas dan kualitas pelaksanaannya. Pembentukan kapasitas dan kualitas manusia ini antara lain sangat ditentukan oleh sistem dan mutu pendidikan. Jadi pendidikan dan pengembangan SDM terdapat korelasi yang sangat signifikan.

Lembaga pendidikan sebagai salah satu ajang untuk membentuk SDM yang berkualitas di daerah ini masih belum memadai, khususnya lembaga pendidikan yang arahnya sinkron dengan tuntutan, bakat, minat atau potensi masyarakat serta daerahnya. Dalam kaitannya dengan tantangan globalisasi dan persaingan antar bangsa pada masa akan datang, dituntut ketersediaan SDM yang unggul dan berkualitas.

Maka penyelenggaraan pendidikan menjadi wajib, terutama dengan biaya murah. Banyak pihak yang diuntungkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang murah. Para peserta didik dan keluarganya akan merasa bahagia, karena sekolah tidak akan menjadikannya makin miskin.<sup>18</sup> Membuat bahagia adalah tugas sekolah. Pendidikan harus dijauhkan dari nuansa bisnis layaknya *real estate* yang senantiasa mengalami kenaikan seiring dengan harga tanah yang membumbung.

---

<sup>18</sup>Eko Prasetyo. 2004. *Orang Miskin Dilarang Sekolah*, Jogjakarta: Insist Press, Cet. Ke-1.

Pembiayaan murah itu bisa disiasati dengan pembangunan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menanggulangi biaya operasional sedangkan masyarakat membiayai hidup putra-putrinya.

#### **D. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Plus**

Adanya sebagian kelompok yang tidak puas dengan hasil lembaga pendidikan, telah menimbulkan ide-ide baru tentang pendidikan seperti sekolah bebas dan sekolah alternatif. Sekolah bebas menginginkan agar para siswa membuat konsep sendiri tentang belajar atau belajar menurut cara mereka sendiri. Sekolah semacam ini murid-murid, disamping memilih sendiri cara belajar dan materi pelajaran sesuai dengan bakat dan harapannya, tempat belajarpun bisa bebas di mana saja yang mereka inginkan. Untuk mencatat keberhasilan belajar, mereka dipakai sistem kredit. Apapun bentuk ide-ide itu semua masih merupakan lembaga pendidikan, hanya proses dan lokasi belajarnya yang bervariasi.

Oleh karena dengan banyaknya lembaga pendidikan yang mempunyai kekhasan yang berbeda-beda, itu merupakan upaya untuk meyakinkan masyarakat agar percaya terhadap lembaga pendidikan yang dikembangkannya. Sebab masyarakat tidak hanya melihat fasilitas gedungnya saja namun juga melihat hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan.

Mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan di wilayah perbatasan sebagaimana di atas, maka penyelenggaraan pendidikan integratif *ala* pondok pesantren, dengan tetap disesuaikan dengan kebutuhan rill bangsa sesuai dengan konteks perbatasan adalah sebuah keniscayaan. Setidaknya, untuk pengembangan dan penguatan pendidikan keagamaan, spirit pesantren yang bisa diserap dan diimplementasikan antara lain dengan menempuh tiga langkah di bawah ini, dan diharapkan memberi nilai tambah.

##### **1. Penguatan Pendidikan Model Boarding School**

Trend *boarding* atau sering disebut juga dengan sistem pemondokan dalam asrama bisa menjadi sarana untuk

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Muatan-muatan pendidikan keagamaan yang ditransformasikan kepada para siswa madrasah tidak hanya menjadi tabungan pengetahuan. Kegiatan asrama menjadi medan aktualisasi nilai-nilai keagamaan di bawah pengawasan seorang guru, ustadz atau seorang kiai.

Sistem ini patut diserap, karena selama ini penyelenggaraan pendidikan keagamaan berlangsung seperti halnya sekolah formal. Memang modal yang dikeluarkan besar, karena membutuhkan jumlah ruangan yang tidak sedikit. Tapi hal itu bisa disiasati dengan tetap mempertahankan corak pesantren. Misalnya dengan menggunakan perumahan penduduk atau warga sekitar, sehingga akses jarak tempuh menjadi dekat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tambahan di sore dan malam hari dalam menambah kompetensi siswa. Cara lain adalah dengan mengorbankan ruangan kelas yang kemudian didesain untuk menampung sekitar 20 siswa/kelas, bahkan bisa lebih. Kondisi seperti itu mengandung banyak pelajaran berharga seperti bagaimana latihan bekerjasama, setia kawan, menghargai orang lain, dan—yang terpenting—bisa mengamalkan ajaran agama. Ini adalah sebuah potret pesantren.

Keadaan seperti itu memang menggambarkan seolah-olah kumuh. Padahal kekumuhan itu tergantung sistem pengelolaannya saja. Jikalau pengelolaannya baik, maka kesan kumuh tidak akan menjadi label.

Kelebihan tradisi pesantren sebenarnya ada pada di sisi itu, yakni kebersamaan dan saling pengertian antar santri, di samping proses pembelajarannya. Jika sudah seperti itu, spirit pesantren benar-benar mengekspansi madrasah.

Praktik pembelajaran sebagaimana di atas telah banyak menuai hasil. Karena hal itu yang menginisiasi Dave Meier untuk menulis sebuah buku yang diberi judul *The Accelerated Learning Handbook*. Dia menyatakan bahwa proses belajar seseorang bisa optimal jika ada pelibatan unsur tubuh (gerakan, praktik, somatis), berbicara (auditori), skema (visual), dan melibatkan

perenungan, pemecahan masalah, dan emosi (intelektual).<sup>19</sup> Hal seperti itu hanya mungkin dilakukan dalam kegiatan asrama. Bahkan daya serap seorang siswa yang mendapatkan pelajaran lalu mempraktikkan, mengungkapkan dan melakukan bisa mencapai 90%.

## 2. Mengkaji Kitab Kuning

Kitab kuning adalah bagian warisan peradaban (*turats*) Islam yang sangat berharga. Di sanalah sumber informasi dunia Islam baik sejarah, teknologi, dan pengetahuan lainnya. Selama ini, hanya dunia pesantren yang mampu mengenal, membaca dan menggali isi kitab kuning.

Bagi siswa madrasah, penguasaan akan khazanah klasik ini merupakan beban yang berat. Apalagi jika memperhatikan input siswa selama ini. Mampu membaca kitab sebenarnya adalah sesuatu yang senantiasa diimpikan. Sayangnya, harapan tinggal harapan, kondisi tersebut nyaris tidak pernah tercapai. Kalaupun tercapai, paling hanya sebagian kecil madrasah. Itupun madrasah yang pengelolaannya bergabung atau berada di bawah pesantren.

Memang, pesantren dalam kurun waktu yang panjang telah mengkonsumsi kitab kuning sebagai pedoman berpikir dan acuan bertingkah laku. Ia telah menjadi bagian yang inheren dalam pesantren. Keadaan seperti ini diharapkan menular ke madrasah. Peristilahan kitab kuning ini sendiri belum diketahui dari mana munculnya istilah itu pertama kali, siapa penemunya dan belum disepakati batasan termnya.

Memang secara kebetulan, kitab-kitab yang dipergunakan di dunia pondok pesantren adalah buku-buku yang mempunyai ciri-ciri unik; (1) ditulis memakai huruf Arab atau Melayu/Jawa/Sunda dan sebagainya; (2) huruf-hurufnya tidak diberi syakal dan karena itu sering disebut juga dengan "kitab gundul."

---

<sup>19</sup> Dave Meier. 2002. *The Accelerated Learning Handbook*. Bandung: Kaifa, Cet. Ke-1.

(3) Umumnya dicetak di atas kertas berwarna kuning berkualitas murah, lembarannya terlepas, tidak berjilid, sehingga mudah diambil bagian-bagian yang diperlukan tanpa harus membawa satu kitab yang utuh. Karena (4) sifatnya yang “gundul” itu maka tidak semua orang bisa dibaca sembarang orang yang tidak mengetahui ilmu *nahwu* dan *sharaf*.<sup>20</sup>

Di dunia pesantren, pengajian kitab kuning merupakan pendidikan lanjutan setelah pengajian al-Quran dan bahasa Arab. Setiap siswa atau santri yang mengaji kitab kuning harus lulus tingkat sebelumnya, yakni bisa membaca al-Quran dan berbekal bahasa Arab, dalam hal ini ilmu nahwu dan sharaf.<sup>21</sup> Untuk itu lah mengapa, pengajian kitab kuning pada madrasah sebagai bagian dari langkah penguatan dan pengembangan pendidikan keagamaan dipersyaratkan bagi para siswa mempunyai kemampuan dasar membaca al-Quran dan mengetahui tata bahasa Arab, yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya.

Karena pendidikan madrasah dibatasi oleh *space* waktu yang terbatas, sebaiknya kitab kuning yang dikaji sebagaimana di bawah ini:

*Pertama*, bidang tafsir dan ilmu tafsir. Kitab standar yang bisa dijadikan pegangan antara lain *Ulumul Quran* karya Manna' al-Qaththan. Sedang kitab tafsirnya adalah *Tafsir Jalalain* karya Jalaluddin As-Suyuthi atau *Tafsir al-Quran al-Adzim* karya Ibnu

---

<sup>20</sup>Namun, akhir-akhir ini sifatnya yang semula itu sudah mengalami perubahan ketika dicetak kemudian. Kitab kuning cetakan baru, sudah banyak memakai kertas putih yang sudah umum dipakai di dunia percetakan. Demikian juga sudah banyak di antaranya yang tidak gundul lagi, karena sudah diberi *syakl* untuk lebih memudahkan membacanya, dan sebagai sudah dijilid rapi. Dari penampilan fisiknya tidak mudah lagi dibedakan dengan karangan-karangan baru yang bisanya disebut *kutub 'ashriyah*. Kini perbedaannya terletak pada isinya, sistematikanya, metodologinya, bahasannya dan pengarangnya. Studi mendalam tentang kitab kuning dan pesantren secara kritis dan komprehensif ini pernah dilakukan oleh Martin van Bruinessen. 1995. *Kitab Kuning; Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan, Cet. Ke-1, h. 18

<sup>21</sup>Kareel A Steenbrink. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, h. 11-13

Katsir. Mungkin bisa dikembangkan mencari kitab tafsir lainnya. Jadi penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang dimaksud di sini adalah pendidikan pesantren. Sementara nilai lebihnya ada pada pengelolaan muatan pesantren yang disinkronkan dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Misalkan jika lembaga pendidikannya diarahkan sebagai lembaga pendidikan yang berkejuruan ke pembudidayaan ikan dan pertanian, maka kajian tafsirnya dibawa kepada *tafsir bil'ilmu*, semisal karya Syaikh Thanthowi Jauhari.

*Kedua*, bidang Hadis dan ilmu Hadis. Kitab Hadis standar yang sederhana dan bisa dipergunakan adalah minimal menggunakan *Arbain Nawawiyah*. Satu tingkat di atasnya adalah *Bulughul Maram* dengan syarahnya *Subulussalam*. Sedangkan ilmu hadisnya bisa menggunakan kitab *Taysir*.

*Ketiga*, bidang fiqh. Kitab yang bisa dikaji minimal adalah *Fathul Qarib*. Jikalau para siswa sudah mempunyai kemampuan standar, maka bisa menggunakan kitab di atasnya seperti *Kifayatul Akhyar* atau *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq.

*Keempat*, Ushul Fiqh. Bisa dipergunakan kitab yang paling kecil adalah *Al-Mabadi' Al-Awwaliyah* untuk kelas 1, *as-Sulam* untuk kelas 2, *al-Bayan* untuk kelas 3.

Sebagai materi tambahan, di luar kitab kuning tampaknya perlu ada tahfidz (hafalan) al-Quran. Hafalan ini tidak harus surat-surat panjang, tapi berupa surat-surat pendek dan surat penting lainnya. Surat-surat pendek ini akan menjadi bekal ketika dia terjun di tengah masyarakat, terutama sekali ketika mereka menginginkan untuk menjadi imam shalat *rawathib*.<sup>22</sup>

Keempat materi di atas plus tahfidz adalah modal standar. Kandungan dalam materi di atas sarat dengan bekal dan wawasan keagamaan dasar yang dirasa cukup sebagai bekal untuk kehidupannya di tengah masyarakat. Namun hal di atas perlu ada satu penguasaan lagi yakni bahasa Arab dan Inggris.

---

<sup>22</sup>Shalat Rawatib adalah istilah lain untuk shalat lima waktu yang fardhu



### 3. Penguasaan Bahasa Asing

Bahasa adalah alat komunikasi. Jikalau dunia pesantren hanya akrab dengan Bahasa Arab, maka dalam pendidikan madrasah selain Bahasa Arab diharapkan ada penguasaan tambahan atas bahasa Inggris dan lainnya.

Namun sayangnya, karena input siswa madrasah adalah siswa kelas pinggiran, heterogen, dan mempunyai pengetahuan standar, maka madrasah harus berjuang lebih keras untuk menyetarakan kemampuan siswanya. Jikalau siswa madrasah ada yang belum lancar membaca al-Quran, maka program di madrasah harus mengarahkan siswa agar bisa baca al-Quran. Kondisi seperti ini memang cukup merepotkan. Tapi hal itu sekaligus menjadi kelebihan dari pendidikan madrasah. Karena madrasah tidak menolak siswa yang hendak belajar.

Akhirnya, madrasah yang seharusnya sudah mengenalkan bahasa Arab harus mengarahkan siswa untuk bisa baca terlebih dahulu. Kondisi yang demikian ini hampir merata pada berbagai jenjang; Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Bahkan di perguruan tinggi agama, masih ada—untuk tidak menyebut banyak—yang belum lancar membaca al-Quran.

Keadaan seperti ini memang harus segera dirubah. Bagi siswa yang masuk madrasah dan belum mempunyai kemampuan membaca al-Quran harus mengikuti program *matrikulasi* membaca al-Quran selama (minimal) 1 bulan. Baru kemudian bisa mengikuti pelajaran lainnya. Setelah itu baru masuk untuk mengantarkan para siswa agar bisa minimal berbahasa Arab dan Inggris.

Penyelenggaraan pendidikan dengan model *boarding school* bisa mempercepat penguasaan bahasa siswa. Sebab, modal utama berbahasa adalah berani mempraktikkan dan berada dalam sebuah lingkungan yang terbiasa berbahasa (*bi'ah lughawiyah*). Pengelolaan *boarding school* secara baik dan profesional akan mengantarkan para siswa ke tujuan tersebut.

Biasanya langkah awal yang dilakukan dengan memberikan *mufradat* (kosa kata) pada tiga bulan pertama. Pada tiga bulan ini pula, jika diamati sekaligus menjadi media memperlancar

ketrampilan membaca bagi siswa yang baru bisa membaca huruf Arab. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Tiga bulan pertama ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Satu hal yang penting untuk diperhatikan, yakni pengawasan selama proses tersebut.

### **E. Pengembangan Pertanian dan Perikanan**

Pembudidayaan perikanan dan pertanian dimaksudkan dalam rangka meningkatkan mutu produk pertanian dan perikanan agar para petani dan nelayan menjual produknya tidak dalam bentuk barang mentah. Dengan produk olahan akan dapat meningkatkan harga jual.

Di sinilah peran dan fungsi sekolah dalam menyelenggarakan riset-riset untuk mengembangkan dan membudidayakan sumber daya alam yang ada, misalnya hasil perikanan dan pertanian.

Pembudidayaan potensi perikanan mulai dari penangkapan hingga pengolahannya akan makin mengharumkan nama Sebatik khususnya dan nama bangsa Indonesia pada umumnya.

## **IV. PENUTUP**

Inovasi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan murah di wilayah perbatasan mutlak perlu diadakan. Hal itu bisa dilakukan jika ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga melalui pendidikan, bisa menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia di hadapan bangsa lain.

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rentan terhadap berbagai kejadian termasuk kejahatan kemanusiaan dengan beraneka ragam bentuknya. Penyelenggaraan pendidikan bermutu merupakan salah satu cara meningkatkan kesadaran masyarakat perbatasan akan jati dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Memperhatikan keadaan masyarakat di perbatasan tersebut, maka bentuk pendidikannya adalah pendidikan yang mampu memadukan antara kekuatan sains dan teknologi dengan moralitas. Format pendidikan keagamaan yang berbentuk pesantren modern plus adalah format yang ideal. Pesantren tidak hanya memberikan

bekal ilmu agama *an sich*, namun juga penguatan keilmuan di bidang pertanian dan perikanan.

### Sumber Bacaan

- Bruinessen, Martin van. (1995): *Kitab Kuning; Pesantren, Tarekat dan Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung, Mizan, Cet. Ke-1
- Dhofier, Zamakhsyari. (1982): *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta, LP3ES.
- Mastuhu (1994): *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta, INIS.
- Meier, Dave. (2002): *the Accelerated Learning Handbook*, Bandung, Kaifa, Cet. Ke-1.
- Prasetyo, Eko. (2004): *Orang Miskin dilarang Sekolah*, Jogjakarta, Insist Press, Cet. Ke-1.
- Raharjo, M. Dawam (1985): *Pergumulan Dunia Pesantren*. Jakarta, P3M.
- Steenbring, Karel A. (1986): *Pesantren, Madrasah, Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES.
- Tim BPS Kab Nunukan (2006): *Kab. Nunukan dalam Angka Tahun 2006*, Nunukan, BPS Kab. Nunukan.
- [www.studi-perbatasan.blogspot.com](http://www.studi-perbatasan.blogspot.com)
- Ziemek, Manfred. (1986): *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta.